

MK Berpeluang Batal

Dari Halaman 1

"Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wakil khusus juga PBB," ucapnya.
Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.
Rumusan itu akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan

presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.
"Khususnya kepada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu," ucapnya.
Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.
"Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10

fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan," katanya.
Parliamentary threshold merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu, agar bisa diikuti dalam pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Merujuk UU Pemilu, partai politik bisa masuk DPR jika memenuhi perolehan 4 persen dari total suara nasional yang sah atau minimal 25 persen dari total suara sah di satu provinsi. (cnni/js)

Pemerintah Impor.....

Dari Halaman 1

Selasa (14/1).
Sudaryono mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar susu menjadi salah satu menu wajib di program MBG. Sayangnya pasokan yang ada tidak memenuhi sehingga pemerintah mensubstitusi gizi dari susu ke menu lain.
Oleh sebab itu, kata Wamentan, pemerintah sengaja memutuskan mengimpor banyak sapi dari luar agar produksi susu dalam negeri meningkat.
"Susu itu kan sebetulnya maunya Pak Presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor, kita substitusi dulu sumber protein lain dulu sementara kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi dalam negeri," jelasnya.
Sudaryono mengungkapkan saat ini pemerintah tengah dalam proses mendatangkan 200 ribu sapi perah sampai akhir 2025.
"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masuk dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu (sapi) sampai akhir tahun. Ini kebut semua lahan peternaknya di mana," kata dia.
Dikatakan bahwa banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik berikut sapihnya. Setidaknya sejauh ini sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen membangun investasi tersebut.
"Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini, bikin pabrik susu dengan sapihnya didatangkan," pungkasnya. (rm/js)

Pakai Dana Zakat

Dari Halaman 1

DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.
"Contoh, bagaimana kita memstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program ma-

kan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.
Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN. Dia juga menyinggung dukungan dana dari pemerintah Jepang yang menyatakan hendak mendukung program tersebut.
"Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara

ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ujar Sultan.
"Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, walaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya. (det/js)

Kejagung Kebut Kasus

Dari Halaman 1

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus.
Adapun hari ini, kata Hari, keduanya tengah diperiksa satu sama lainnya. Tom Lembong diperiksa sebagai saksi untuk Charles dan sebaliknya.
"Jadi namanya saksi mahkota," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2024).
"Tapi yang pasti, biasanya kalau TTL (Tom Lembong) sudah diperiksa untuk tersangka ini (Charles), tersangka ini (Charles) sudah diperiksa untuk TTL, berarti kan penyidik sudah tinggal di puncak nih dalam konteks penyelesaiannya," lanjut dia.
Harli menegaskan pihaknya tak main-main dalam melakukan penyidikan terhadap perkara. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi impor gula Kemendag.
"Saya sudah sampaikan, penyidik tidak akan main-main, siang malam fokus bagaimana menyelesaikan perkara-perkara semua, termasuk TTL. itu komitmen kita," pungkasa dia. DUDUK PERKARA

Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 ini baru menjerat dua tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).
Dalam kasus ini ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah (GKM), gula kristal rafinasi (GKR), dan gula kristal putih (GKP). Mudah-mudahan, GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung.
Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendag, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP.
Sedangkan dalam perkara ini--pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP--seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM, yang kemudian diolah menjadi GKP.
Jaksa mengatakan Tom Lembong mene-

kan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada sembilan perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM.
"Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL (Thomas Trikasih Lembong), persetujuan impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung," kata Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
"Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara," imbuh Abdul Qohar. (det/js)

Kader Hingga Satpam

Dari Halaman 1

tar M Godam selaku pegawai negeri sipil, dan Saeful Bahri selaku kader PDIP.
Selain itu, lanjut Tessa, tim penyidik juga memanggil 2 orang saksi lainnya untuk tersangka buronan Harun Masiku (HM). Keduanya adalah, Carolina Wahyu Apriyasiari selaku Kepala Keptabuhan PT Valuta Inti Prima, dan Dona Barisa selaku Notaris yang juga diketahui mantan istri Saeful Bahri.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang

juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto,

untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024. (rm/js)

Kemenhub Siapkan

Dari Halaman 1

Kemenhub tahun ini.
"Di tahun ini nggak hanya di perhubungan ya tetapi semua kementerian dikurangi jumlah anggarannya di 2025, sehingga terjadi prioritas kegiatan-kegiatan di K/L. Untuk BTS sendiri dari Rp 437 miliar, menjadi Rp 177 miliar," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, Selasa (14/1/2025).
Sementara anggaran menurun, terjadi penurunan juga kota yang mendapatkan subsidi BTS. Tahun ini hanya 8 kota yang mendapatkan anggaran subsidi BTS.

"Jadi yang tadinya 11 kota menjadi kami 6 kota lama, dan dua kota baru. Di mana yang lama 12 koridor, dan kota baru ada di Manado dan Pontianak, masing-masing dua koridor," terangnya.
Adapun, kota yang masih jalankan angkutan bus subsidi diantaranya, lembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado.
Sebelumnya, 11 kota penerima program BTS pada tahun 2024 diantaranya, Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.
"Ini kan kita harus berpikir realistis mana

yang harus diprioritaskan yang dibiayai, mana yang komitmen pemerintah yang kegiatannya tinggi, mana yang perlu di support lebih lanjut koridor mana yang perlu dilanjutkan," jelas dia.
Ernita menambahkan, untuk pembangunan angkutan kota di daerah, Kemenhub senantiasa memberikan pendampingan kepada daerah. Jadi pemerintah tidak lepas tangan saat memberikan subsidi angkutan perkotaan.
"Kami memberikan pendampingan, apakah nanti bentuknya UPT, apakah badan usaha, seperti Bandung, Medan. Itu kami melakukan pendampingan, dalam mengambil alihan itu seperti apa, kemudian juga sistem tiketnya seperti apa," terangnya. (deh/js)

Israel dan Hamas Sepakat

Dari Halaman 1

sensitif, mengatakan telah ada kemajuan dalam finalisasi kesepakatan tersebut.
Pada Senin (13/1/2025), penyiar publik Israel, KAN, menyebutkan bahwa kabinet keamanan Israel mungkin akan bersidang pada Selasa untuk menyetujui kesepakatan itu. Kesepakatan tersebut hampir siap dengan asumsi situasi tetap seperti sekarang, dan penandatanganannya diharapkan pada Jumat atau bahkan lebih awal, kata sumber Palestina tersebut.
Kesepakatan terbagi menjadi tiga tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama 40 hingga 42 hari, tambah mereka. Pada tahap pertama, pasukan Israel akan tetap ditempatkan di sepanjang koridor Netzarim dan Philadelphi.
Sepekan kemudian, Hamas akan menyerahkan daftar tahanan Israel yang ada dalam tahananannya, setelah itu Israel akan mengizinkan warga yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara. Mengenai pengaturan kepulungan, sumber tersebut mengatakan Israel akan menarik sebagian dari Koridor Netzarim guna memungkinkan perjalanan aman warga sipil menuju utara.



Mereka yang kembali dengan berjalan kaki tidak akan dikenakan pemeriksaan, sementara mereka yang bepergian dengan mobil akan diperiksa menggunakan peralatan yang disediakan oleh pihak

internasional untuk mencegah penyelundupan senjata atau individu bersenjata. Sumber tersebut juga menyoroiti perselisihan mengenai lebar zona penyangga. (rep/js)



Mengubah Wajah Politik

Dari Halaman 1

men) sebesar empat persen suara sah nasional menyoroiti isu penting dalam sistem pemilu di Indonesia.
Ambang batas parlemen bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memastikan stabilitas politik di parlemen. Namun, hal ini sering diperdebatkan dari segi keadilan dan representasi, karena partai dengan perolehan suara kecil tidak dapat terwakili di parlemen meskipun memiliki dukungan signifikan dari masyarakat.
Jika MK membatalkan aturan ini, berarti mereka menilai bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi atau konstitusi, khususnya terkait hak-hak politik dan kesetaraan dalam representasi.
Jika ambang batas dibatalkan, partai-partai kecil akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk parlemen. Ini dapat memperkaya keberagaman suara di parlemen, tetapi juga berpotensi meningkatkan fragmentasi politik.
Pembatalan parliamentary threshold bisa menjadi langkah signifikan dalam mendorong sistem yang lebih inklusif. Namun, dampaknya pada stabilitas pemerintahan juga perlu dipertimbangkan, mengingat parlemen yang terlalu terfragmentasi dapat memperlambat proses legislasi dan pengambilan keputusan.
Pernyataan Yusril mencerminkan dinamika penting dalam demokrasi Indonesia, yaitu keseimbangan antara menyederhanakan sistem politik dan menjamin representasi yang adil.
Jika MK membatalkan ambang batas parlemen, hal ini akan menjadi preseden hukum yang signifikan dan dapat mengubah wajah perpolitikan nasional. Namun, keputusan seperti ini memerlukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap sistem politik, stabilitas pemerintahan, dan keadilan demokratis.
Dalam persepektif komunikasi politik, pernyataan Yusril dapat dilihat sebagai upaya untuk mengarahkan perhatian publik dan elite politik pada isu parliamentary threshold. Dengan membawa topik ini ke ranah publik, ia mencoba mengatur agenda diskusi politik, sehingga masyarakat dan pemangku kebijakan mulai memperhatikan dampak ambang batas terhadap representasi politik dan demokrasi. Fokusnya adalah membongkai isu ini sebagai sesuatu yang relevan dan mendesak, mengingat potensi dampaknya pada keadilan dalam sistem pemilu.
Yusril sepertinya membongkai ambang batas parlemen sebagai isu yang layak ditinjau ulang dari sudut pandang konstitusional. Framing yang ia gunakan mengarahkan opini bahwa aturan parliamentary threshold berpotensi merugikan demokrasi dan hak representasi partai-partai kecil. Dengan demikian, ia memosisikan MK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.
Pernyataan ini berfungsi untuk memicu diskusi di ruang publik tentang inklusivitas dan representasi politik dalam demokrasi Indonesia. Menurut teori komunikasi politik, isu ini dapat menjadi bahan diskusi di berbagai platform, seperti media massa, forum politik, hingga ruang publik digital, yang pada akhirnya memengaruhi pandangan masyarakat.
Dalam konteks komunikasi politik, pernyataan Yusril dapat dipahami sebagai upaya memulai diskusi deliberatif. Ia mengundang masyarakat, partai politik, dan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan ulang parliamentary threshold, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Proses deliberatif ini mencakup dialog terbuka tentang pro dan kontra ambang batas, dengan melibatkan berbagai perspektif.
Parliamentary threshold berkaitan langsung dengan representasi politik. Dalam teori ini, pernyataan Yusril menyoroiti bahwa ambang batas dapat menghambat prinsip representasi yang inklusif, di mana suara minoritas atau partai kecil sering kali terabaikan. Dalam kerangka ini, Yusril tampaknya mendukung gagasan bahwa setiap suara rakyat, berapa pun jumlahnya, harus memiliki peluang untuk terwakili di parlemen.
Dalamacamata teori komunikasi politik, pernyataan Yusril Ihza Mahendra tentang parliamentary threshold dapat dimaknai sebagai strategi komunikasi untuk memengaruhi agenda politik, membuka ruang diskusi publik, dan menyoroiti isu keadilan demokrasi. Pernyataannya juga menggarisbawahi pentingnya representasi politik yang inklusif dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini tidak hanya relevan bagi perdebatan akademis, tetapi juga dapat memengaruhi opini masyarakat dan keputusan kebijakan di masa depan.